

EVALUASI PENENTUAN DAERAH KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DI WILAYAH JAWA TENGAH

Oleh:

Abdul Aziz Ahmad¹⁾ dan Endang Setiasih²⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

²⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

This research evaluates determination of Special Economic Region or Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) in Central Java – Yogyakarta Province. On regional typology aspect, counted by economic growth and per capita income, determination of KEK by Central Java Governor tends not to base by the factors. It is proofed by Demak, Rembang, and Blora Regency which enacted to be special economic region even these regencies left behind other regions relatively.

Nevertheless, Kendal Regency that planned to be basis of Central Java KEK has superiority and potential in industrial sectors. But in regional typology, this area is classified by advanced but suppressed region; high per capita income but low economic growth.

Alternatively, Joglosemar triangle area has interesting note. The three towns: Yogyakarta, Surakarta and Semarang Town, shows advance and grow faster typology. These areas also have better infrastructure than other regencies/towns. The development in Joglosemar corridor will have positive agglomeration effect to contiguous areas.

Keywords: KEK, regional typology, agglomeration

PENDAHULUAN

Aglomerasi merujuk pada *clustering* perusahaan-perusahaan di lokasi tertentu di suatu daerah perkotaan. Dampak dari kluster ekonomi adalah memunculkan kesempatan kerja baru di daerah itu. Maoh dan Kanaroglou (2004) menyatakan bahwa kluster merupakan upaya vital dari suatu daerah untuk menstimulasi pertumbuhan di area perkotaan. Manfaat dari ekonomi aglomerasi dan peran dari pertumbuhan perkotaan pertama kali diperkenalkan oleh teori Marshall. Ia memberikan argumentasi bahwa kegiatan ekonomi eksternal seperti *pooling* pasar tenaga kerja, *input sharing* dan *technological spillover* yang mendorong level produktivitas suatu kota akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Maoh dan Kanaroglou (2004) menunjukkan terdapat bukti-bukti empiris dari Glaeser (1992), Hanson (1996) yang telah mendukung teori Marshall tersebut.

Aglomerasi suatu daerah juga menunjukkan hubungan sentripetal dan sentrifugal yang bergerak secara simultan. Hal ini dinyatakan oleh Krugman yang mempelopori pendekatan *New Economic Geography* (NEG). Pendekatan ini menjelaskan tensi struktur geografi ekonomi dipengaruhi oleh kekuatan dari dua faktor yang berlawanan tersebut. Pendekatan NEG tidak hanya berfokus pada konsentrasi industri tertentu di suatu daerah, tetapi juga meliputi pendekatan pada struktur vertikal produksi yang juga akan

memungkinkan meningkatkan atau menurunkan konsentrasi industri (Dahl, 2001).

Pembentukan kawasan ekonomi khusus di Jawa Tengah–DIY pada penelitian ini dilihat sebagai proses pembentukan aglomerasi di wilayah tertentu. KEK di wilayah ini merupakan perencanaan kebijakan untuk menentukan suatu daerah menjadi pusat ekonomi dengan fokus pada sektor industri. Dampak adanya KEK ini bukan hanya akan memberikan manfaat positif bagi perkembangan ekonomi daerah utama (KEK), tetapi juga akan memberikan stimulasi positif meningkatnya aktivitas ekonomi daerah sekitar KEK. Daerah KEK ini terutama diproyeksikan sebagai daerah penyangga untuk menyediakan input bagi daerah kawasan khusus. Satu program khusus untuk mendorong investasi yang diluncurkan pada awal tahun 2006 adalah upaya untuk mengembangkan KEK.

Sebagai tahap awal, KEK ini secara khusus diperuntukkan bagi pengembangan investasi di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun. Dari KEK tersebut, pemerintah menyatakan jika model pengembangan ini berhasil, maka dapat dikembangkan KEK di provinsi lain. Pembentukan KEK ini akan berbentuk kerja sama yang erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta partisipasi dunia usaha. KEK ini diharapkan akan merupakan simpul-simpul dari pusat kegiatan ekonomi unggulan, yang didukung baik fasilitas pelayanan prima maupun kapasitas prasarana yang berdaya saing internasional.

Di samping 12 Kawasan Ekonomi Khusus sebagai bahan kajian dari Ditjen Penataan Ruang (Anonim, DPU, 2006), terdapat berbagai usulan pendirian KEK untuk wilayah atau provinsi lain dari pihak pemerintah daerah. Salah satunya adalah upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang membahas penentuan Kawasan Ekonomi Khusus. Pemerintah Provinsi ini mengusulkan dua wilayah yang potensial menjadi kawasan ekonomi khusus. Pertama, Semarang-Kendal-Demak-Ungaran (Kabupaten Semarang) dan kedua, Rembang-Blora. Pada akhirnya, keputusan penentuan KEK di Jawa Tengah mengerucut untuk berfokus pada wilayah Kendal. Beberapa pertimbangan dari pemerintah daerah terkait dengan penetapan Kendal sebagai prioritas KEK Jawa Tengah antara lain: KEK di Kendal akan menyerap tenaga kerja yang signifikan, terdapat beberapa investor yang sudah dipastikan menanamkan modal di KEK Kendal dan daerah Kendal adalah daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai KEK bagi industri otomotif, karena tenaga kerja memadai dan infrastrukturnya mudah dibangun, serta lokasinya masih dalam jangkauan industri komponen otomotif.

Terkait dengan upaya pengembangan kawasan ekonomi, khususnya di Jawa Tengah, topik mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jawa Tengah menarik untuk dikaji. Penelitian ini berusaha untuk melakukan evaluasi ketepatan penentuan daerah KEK Jawa Tengah. Dengan posisi relatifnya yang sulit untuk dipisahkan dari daerah lain (khususnya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), maka untuk melihat perekonomian daerah-daerah di Jawa Tengah perlu pula melihat komparasi dengan daerah-daerah di DIY. Karena itu, penelitian ini membatasi lingkup wilayah penelitian hanya pada wilayah Jawa bagian Tengah, yang meliputi Propinsi Jawa Tengah dan DIY.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji potensi ekonomi kabupaten/kota di wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Jawa bagian tengah, yang meliputi Propinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan menentukan sektor-sektor basis (unggulan). Selain itu, perlu pula digambarkan kondisi tipologi di wilayah tersebut, penggunaan analisis spesialisasi regional untuk mengetahui tingkat spesialisasi antardaerah dan melihat ketepatan penentuan kawasan andalan berdasar faktor-faktor ekonomi.

1. Tipologi Daerah

Tipologi Daerah menunjukkan gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Tipologi utama pada penelitian ini membagi daerah berdasarkan dua indikator utama; pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Axis ditentukan sebagai berikut: sumbu vertikal menunjukkan rata-rata

pertumbuhan ekonomi, sumbu horizontal menunjukkan pendapatan perkapita daerah. Daerah yang diamati dibagi menjadi empat klasifikasi (Tabel 1) berikut: daerah cepat maju dan tumbuh (pertumbuhan ekonomi tinggi dan pendapatan per kapita tinggi), daerah maju tapi tertekan (pendapatan tinggi tapi pertumbuhan rendah), daerah berkembang cepat (pertumbuhan tinggi tapi pendapatan rendah) dan relatif tertinggal (pertumbuhan dan pendapatan rendah).

Tabel 1. Tipologi Daerah Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita

		PDRB per kapita	
		$(y_i < y)$	$(y_i > y)$
Pertumbuhan Ekonomi	$(r_i > r)$	Pendapatan per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi	Pendapatan per kapita tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi
	$(r_i < r)$	Pendapatan per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah	Pendapatan per kapita tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah

Sumber: Kuncoro (2004)

2. Analisis Location Quotients (LQ)

Untuk mengidentifikasi subsektor-subsektor unggulan atau ekonomi basis dari wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Jateng dan DIY akan digunakan alat analisis *Location Quotients*. Subsektor unggulan yang berkembang dengan baik tentunya akan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah secara optimal (Kuncoro, 2004).

Formula yang digunakan untuk analisis *Location Quotient* (SLQ) adalah sebagai berikut (Wagner, 2000);

$$LQ = \frac{e_{si}/e_i}{e_s/e}$$

di mana:

- e_{si} = nilai produksi subsektor s pada daerah kabupaten/kota
- e_i = total PDRB kabupaten/kota
- e_s = nilai produksi sektor s pada Propinsi Jateng/DIY
- e = total PDRB Provinsi Jateng/DIY

Kriteria hasil penilaian yang diterapkan adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2004):

1. $LQ > 1$, berarti tingkat spesialisasi sub sektor tertentu pada tingkat daerah kabupaten/kota lebih besar dari sektor yang sama pada tingkat propinsi

2. $LQ < 1$, berarti tingkat spesialisasi sub sektor tertentu pada tingkat daerah kabupaten/kota lebih kecil dari sektor yang sama pada tingkat propinsi
3. $LQ = 1$, berarti tingkat spesialisasi sub sektor tertentu pada tingkat daerah kabupaten/kota sama dengan sektor yang sama pada tingkat propinsi

Jika suatu subsektor ekonomi memiliki nilai $LQ > 1$ dapat dikatakan bahwa subsektor tersebut merupakan subsektor unggulan dari daerah kota/kabupaten. Sebaliknya, jika $LQ < 1$, subsektor tersebut bukan merupakan subsektor unggulan.

Formula LQ tersebut bersifat statis atau *Static Location Quotients* (SLQ) karena hanya melihat satu periode atau titik waktu saja. Model ini lemah karena tidak dapat melihat apakah suatu sektor yang unggul pada tahun ini masih tetap menjadi sektor unggulan pada tahun yang akan datang. Untuk lebih mempertajam hasil analisis LQ , analisis yang ditambahkan adalah penggunaan model *Dinamic Location Quotient* (DLQ). Model DLQ lebih baik dari model SLQ karena mampu melihat perubahan LQ antar dua rentang periode waktu. Adapun formula yang digunakan untuk analisis DLQ adalah (Kuncoro, 2005):

$$DLQ_{ij} = \left[\frac{(1 + g_{ij}) / (1 + g_j)}{(1 + G_i) / (1 + G)} \right]^t = \frac{IPPS_{ij}}{IPPS_i}$$

di mana:

- DLQ_{ij} = Indeks potensi sektor i di kabupaten/kota j
- g_{ij} = Laju pertumbuhan nilai tambah sektor i di kabupaten/kota j
- g_j = Rata-rata laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota j
- G_i = Laju pertumbuhan nilai tambah sektor i di regional Jateng + DIY
- G = Rata-rata laju pertumbuhan PDRB regional Jateng + DIY.
- t = Selisih tahun akhir dan tahun awal
- $IPPS_{ij}$ = Indeks Potensi Perkembangan sektor i di kabupaten/kota
- $IPPS_i$ = Indeks Potensi Perkembangan sektor i di regional Jateng + DIY

Adapun rumus untuk menentukan laju pertumbuhan sektor ekonomi (Yuwono, 2000: 135) adalah sebagai berikut:

$$g_{ij} = \left[\frac{E_{ijt}}{E_{ij0}} \right]^{1/t} - 1$$

di mana:

- g_{ij} = laju pertumbuhan nilai tambah sektor i di kabupaten/kota j
- E_{ijt} = adalah nilai tambah sektor i di kabupaten/kota j pada tahun akhir pengamatan

- E_{ij0} = adalah nilai tambah sektor i di kabupaten/kota j pada tahun awal pengamatan
- t = adalah selisih tahun akhir dan tahun awal pengamatan

Untuk menentukan g_j , G_i dan G dapat digunakan rumus yang sama dengan rumus di atas. Perbedaannya, untuk mencari g_j data yang digunakan adalah PDRB kabupaten/kota; untuk mencari G_i data yang digunakan adalah nilai tambah sektor i di regional Jateng + DIY, sedangkan untuk mencari G , data yang digunakan adalah PDRB regional Jateng + DIY. Interpretasi nilai DLQ_{ij} adalah:

1. Jika $DLQ_{ij} > 1$ berarti potensi perkembangan sektor i kabupaten/kota j lebih cepat dibandingkan dengan potensi perkembangan sektor i di propinsi regional Jateng + DIY (sektor i tersebut berpotensi unggulan di kabupaten/kota j).
2. Jika $DLQ_{ij} = 1$, berarti potensi perkembangan sektor i di kabupaten/kota j sebanding dengan potensi perkembangan sektor i di regional Jateng + DIY.
3. Jika $DLQ_{ij} < 1$ berarti potensi perkembangan sektor i di kabupaten/kota j lebih rendah dibandingkan dengan potensi perkembangan sektor i di regional Jateng + DIY (sektor i tersebut tidak berpotensi unggulan).

Perolehan nilai SLQ dan DLQ dapat dibuat komparasi dalam tabel potensi sektor-sektor ekonomi untuk setiap kabupaten/kota, di mana:

1. Kuadran (A) : sektor bukan unggulan yang tidak berpotensi unggulan
2. Kuadran (B) : sektor bukan unggulan tetapi berpotensi unggulan
3. Kuadran (C) : sektor unggulan yang tidak berpotensi unggulan
4. Kuadran (D) : sektor unggulan yang berpotensi unggulan

Tabel 2. Klasifikasi Sektorial atas Dasar Analisis Komparatif

Kriteria	DLQ	
	DLQi < 1	DLQi > 1
SLQ	SLQi < 1 A	SLQi > 1 B
	C	D

Sumber: Kuncoro 2005, setelah dilakukan pivot pada tabel

3. Analisis Spesialisasi Regional

Penggunaan alat analisis indeks spesialisasi regional adalah untuk mengetahui tingkat spesialisasi antardaerah di Propinsi Jateng/DIY dengan menggunakan Indeks Krugman, sebagai berikut (Kuncoro, 2004):

$$SI_{jk} = \sum_{i=1}^n \left| \frac{E_{ij}}{E_j} - \frac{E_{ik}}{E_k} \right|$$

di mana:

- SI_{jk} = Indeks Spesialisasi kabupaten j dan k
- E_{ij} = PDRB sektor i pada Kabupaten j
- E_j = PDRB total kabupaten j
- E_{ik} = PDRB sektor i pada Kabupaten k
- E_k = PDRB total kabupaten k

Kriteria pengukuran indeks spesialisasi Krugman adalah jika indeks spesialisasi regional mendekati nol maka kedua daerah j dan k tidak memiliki spesialisasi, dan jika indeks spesialisasi regional mendekati dua maka kedua daerah j dan k memiliki spesialisasi. Batas tengah antara angka nol dan dua adalah satu. Maka, jika nilai indeks spesialisasi lebih besar dari satu maka dapat dianggap sektor tersebut tingkat spesialisasinya yang tinggi. Untuk melihat tinggi rendahnya tingkat spesialisasi suatu daerah terhadap daerah lainnya dipergunakan nilai rata-rata indeks spesialisasi seluruh daerah sebagai pembanding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lokasi Wilayah KEKI Jawa Tengah dan Tipologi Daerah

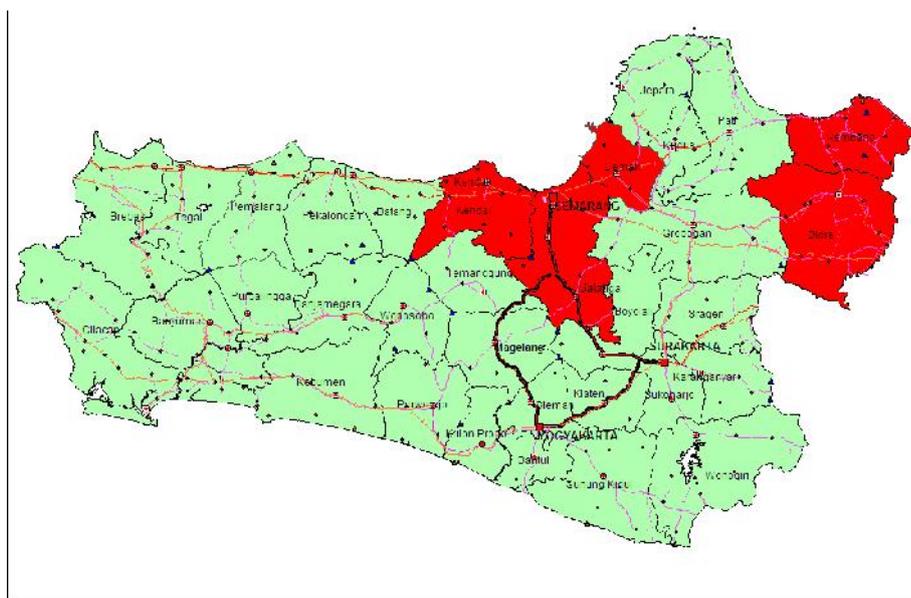
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah mengusulkan 2 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK):

1. KEK 1: Semarang–Kendal–Demak–Ungaran (Kabupaten Semarang)
2. KEK 2: Rembang–Blora

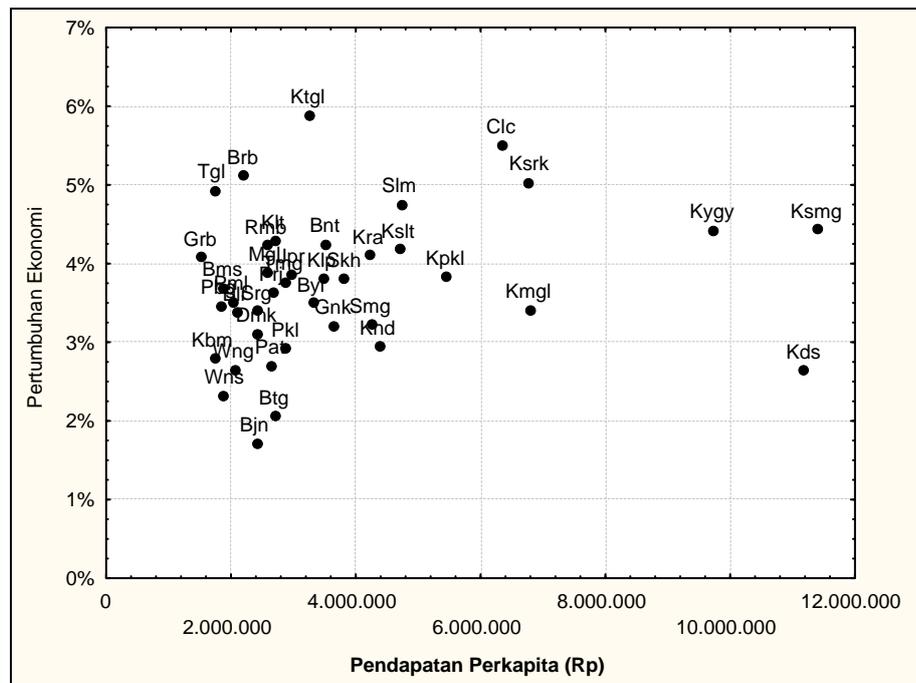
Dua KEK tersebut terletak di wilayah utara pulau Jawa bagian tengah. Posisi Relatif dari dua daerah KEKI Jateng dapat digambarkan pada Gambar 1. KEKI 1 berada di wilayah Kota Semarang dan Sekitarnya dan KEK 2 bagian timur laut Jawa Tengah (area lebih gelap). Untuk melihat kondisi perekonomian di wilayah Jawa Tengah DIY perlu dilihat tipologi masing-masing daerah. Analisis tipologi daerah pada penelitian ini untuk menunjukkan sebaran nilai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita (lihat lampiran Tabel 3).

Rata-rata pendapatan per kapita kabupaten/kota Jateng DIY sebesar Rp3.788.330,73 dan rata-rata pertumbuhan ekonominya sebesar 3,72%. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Tegal (6,79%) sementara daerah dengan pendapatan per kapita tertinggi adalah Kota Semarang (Rp11.390.236,85). Dengan tipologi daerah, sebagian besar daerah berada pada kuadran 3, atau daerah dengan pendapatan perkapita rendah diiringi pertumbuhan ekonomi rendah (dari rata-rata Jateng DIY). Seluruh daerah pada kategori ini berbentuk kabupaten (Gambar 2).

Pada wilayah penentuan KEKI 1, dua daerah tergolong klasifikasi maju tertekan (Kendal dan kabupaten Semarang), satu daerah adalah cepat maju dan tumbuh (Kota Semarang) dan terdapat 1 daerah dengan klasifikasi daerah relatif tertinggal (Demak). Pada wilayah KEKI 2, Blora adalah daerah dengan klasifikasi daerah relatif tertinggal sementara Rembang adalah daerah berkembang cepat. Klasifikasi rinci untuk masing-masing daerah Jateng DIY disajikan pada Tabel 4.



Gambar 1. Kawasan KEKI di Jawa Tengah



Sumber: BPS, data diolah

Gambar 2. Tipologi Daerah Berdasarkan Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi (2000-2004)

Dilihat sisi tipologi daerah, wilayah KEKI 2 (Rembang dan Blora) cenderung ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi sebagai daerah kawasan ekonomi andalan bukan karena faktor tingginya pendapatan perkapita dan tingginya pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat tingginya pertumbuhan ekonomi serta pendapatan perkapita merupakan modal yang penting bagi daerah untuk memperoleh perhatian bagi para investornya. Demikian pula penetapan Demak sebagai wilayah tergabung pada KEKI 1. Daerah ini juga merupakan daerah yang relatif tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah dan DIY.

Sementara, penentuan Kota Semarang, Ungaran (Kabupaten Semarang) dan Kendal dari

sisi tipologi cenderung lebih diterima daripada penentuan daerah KEKI 2. Hal ini didukung tipologi kota Semarang merupakan daerah dengan klasifikasi daerah cepat maju, meskipun Kabupaten Semarang dan Kendal cenderung tertekan karena pertumbuhan ekonominya relatif rendah.

Faktor pendukung penentuan ketiga daerah terakhir tersebut sebagai kawasan KEKI adalah fasilitas yang disediakan oleh wilayah Semarang berupa keberadaan pelabuhan udara serta fasilitas pelabuhan laut. Dengan letaknya yang strategis di kawasan Joglosemar koridor utara, kawasan ini mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi jika ditetapkan sebagai KEK.

Tabel 4. Daerah Berdasarkan Klasifikasi Tipologinya

Klasifikasi	Pendapatan Perkapita	
	Rendah	Tinggi
Tinggi	Daerah berkembang cepat: Magelang, Klaten, Grobogan, Rembang, Jepara, Temanggung, Tegal, Brebes, Kota Tegal, Kulonprogo, Bantul	Daerah cepat maju cepat tumbuh: Cilacap, Sukoharjo, Karanganyar, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Sleman, Kota Yogyakarta
Pertumbuhan Ekonomi Rendah	Daerah relatif tertinggal: Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Boyolali, Wonogiri, Sragen, Blora, Pati, Demak, Batang, Pekalongan, Pemalang, Gunung Kidul	Daerah maju tertekan: Kudus, Semarang, Kendal, Kota Magelang

2. Sektor Unggulan Kabupaten/Kota

Dari hasil perhitungan SLQ dan DLQ tersebut, dapat dinyatakan untuk setiap daerah yang diusulkan pemerintah daerah propinsi sebagai kawasan andalan (KEKI 1 dan 2), daerah yang memiliki sektor ekonomi unggulan dan sekaligus memiliki potensi untuk tetap unggul adalah:

Demak	: Sektor pertanian
Semarang	: Sektor industri pengolahan; serta sektor listrik gas dan air bersih
Kendal	: Sektor industri pengolahan
Kota Semarang	: Sektor industri pengolahan
Blora	: Sektor pertanian; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
Rembang	: Sektor pertanian; sektor pengangkutan dan komunikasi

Untuk wilayah KEKI 1 dan 2, Tabel 5 menunjukkan kriteria sektor-sektor yang merupakan sektor unggulan dan berpotensi unggulan. Dari Tabel 5 ini dapat dinilai bahwa untuk pengembangan kawasan dengan tujuan peningkatan nilai tambah sektor industri pengolahan, maka seluruh daerah di wilayah KEKI 1, kecuali Demak, layak untuk ditetapkan sebagai kawasan andalan. Ungaran (Semarang), Kendal, dan Kota Semarang merupakan daerah yang memiliki keunggulan di sektor industri pengolahan dan sekaligus memiliki potensi untuk tetap unggul. Kelayakan tiga daerah KEKI dengan potensi industri ini ditunjang dengan potensi sektor tersier (modern) antara lain sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa.

Kabupaten Demak bersama dua daerah di KEKI 2 cenderung tidak tepat jika penentuan kawasan andalan bertujuan meningkatkan nilai tambah dan manfaat aglomerasi di sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan di ketiga daerah tersebut dikategorikan sebagai sektor yang bukan unggulan. Sektor ini tidak berpotensi unggulan di Rembang dan Demak, tetapi berpotensi unggulan di Blora.

Dilihat dari potensi unggulnya, ketiga daerah terakhir tersebut menunjukkan keunggulan dan potensi unggul di sektor pertanian. Jika pengembangan wilayah dengan penentuan KEKI sebagai kawasan unggulan berbasis sektor pertanian, maka kabupaten Demak, Blora, dan Rembang sudah tepat menjadi kawasan andalan.

Sebagai perbandingan KEKI Jateng, pada Tabel 5 menunjukkan kriteria SLQ–DLQ daerah dengan tipologi daerah cepat maju cepat tumbuh. Satu-satunya daerah yang tergolong bertipologi ini dengan lokasi di bagian barat Jawa Tengah-DIY adalah Kabupaten Cilacap. Selain kabupaten Cilacap dan Kota Pekalongan (yang berlokasi di bagian utara), daerah-daerah menurut tipologi ini semuanya terletak pada jalur dan sekitar koridor Joglosemar (Kota Yogyakarta, Kota Surakarta atau Solo dan Kota Semarang). Cilacap dikategorikan unggul dan memiliki potensi tetap unggul di sektor pertambangan dan sektor perdagangan hotel dan restoran. Aglomerasi di daerah ini akan mengangkat perekonomian daerah sekitar yang cenderung tertinggal (Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen) atau yang sering disebut sebagai kawasan kerja sama Barlingkascakeb.

Tabel 5. Klasifikasi Sektor Unggulan – Potensi Unggulan di Wilayah KEK Jateng – DIY

Kawasan	Kabupaten	Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEKI 1	Demak	D	A	A	B	A	A	A	A	A
	Semarang	A	A	D	D	B	A	B	B	B
	Kendal	C	B	D	C	A	B	A	A	B
	Kota Semarang	A	B	D	C	C	C	D	A	D
KEKI 2	Blora	D	C	B	B	A	A	A	D	A
	Rembang	D	C	A	A	A	A	D	A	A
Cepat Maju Cepat Tumbuh	Cilacap	C	D	A	A	A	D	A	A	A
	Sukoharjo	B	C	D	D	B	A	A	B	B
	Karanganyar	B	B	D	D	B	A	B	A	A
	Kota Surakarta	A	A	D	C	C	D	C	C	C
	Kota Salatiga	A	A	A	C	A	A	D	C	C
	Kota Semarang	A	B	D	C	C	C	D	A	D
	Kota Pekalongan	B	-	B	C	C	D	C	C	C
	Sleman	A	A	B	B	D	B	C	D	C
Kota Yogyakarta	A	A	A	D	D	D	D	C	C	

di mana:

1 = pertanian, 2 = pertambangan penggalan, 3 = industri pengolahan, dan seterusnya (lihat lampiran)

A = SLQ <1 dan DLQ <1 (sektor bukan unggulan yang tidak berpotensi unggulan)

B = SLQ <1 dan DLQ >1 (sektor bukan unggulan tetapi berpotensi unggulan)

C = SLQ >1 dan DLQ <1 (sektor unggulan yang tidak berpotensi unggulan)

D = SLQ >1 dan DLQ >1 (sektor unggulan yang berpotensi unggulan)

Tabel 5 juga menunjukkan koridor Joglosemar pada umumnya adalah daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh. Pembentukan kawasan ekonomi khusus di tiga pusat pertumbuhan (Yogyakarta, Semarang dan Surakarta) akan mendorong percepatan perekonomian di wilayah ini dan daerah-daerah sekitarnya. Akan tetapi, penentuan kawasan andalan di wilayah koridor Joglosemar perlu mempertimbangkan perbedaan basis sektor ekonomi. Sukoharjo dan Karanganyar lebih tepat menyertai Surakarta sebagai daerah khusus industri pengolahan. Kota Salatiga mendukung aglomerasi Kota Semarang karena kemajuan di sektor transportasinya. Sleman mendukung aglomerasi di Kota Yogyakarta dengan kemajuan sektor bangunan. Sementara, Kota Pekalongan cenderung layak sebagai daerah penyangga kawasan utara Jawa Tengah dengan kemajuannya di sektor perdagangan hotel dan restoran.

3. Analisis Spesialisasi Regional

Rata-rata spesialisasi daerah di hampir seluruh daerah cenderung tidak menunjukkan adanya spesialisasi. Hal ini ditunjukkan dari nilai Spesialisasi Krugman yang berada di bawah nilai 1. Hanya Kota Magelang yang memperlihatkan adanya spesialisasi dengan nilai lebih dari 1. Meskipun demikian, terlihat beberapa daerah yang cenderung mendekati nilai 1. Meskipun masih jauh dari nilai spesialisasi 2, nilai indeks yang mendekati 1 dapat ditafsirkan spesialisasi sektor-sektor ekonomi di daerah ini cenderung lebih tinggi daripada daerah lain. Daerah yang mendekati nilai ke arah spesialisasi ini antara lain Kota Semarang, Cilacap, Karanganyar, Kudus, Kota Surakarta, Kota Salatiga dan Kota Yogyakarta, dimana masing-masing daerah ini nilai ISnya lebih dari 0,70.

Khusus untuk kawasan KEKI 1, hanya Kota Semarang yang memiliki indeks spesialisasi relatif lebih tinggi dari daerah lain, meskipun nilai indeks ini cenderung menurun pada tempo 2000 sampai 2004. Nilai rata-rata indeks Kota Semarang ini sesuai dengan pangsa sektor ekonomi yang mendominasi nilai PDRB. Sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan hotel restoran merupakan sektor ekonomi utama yang total keduanya menyumbang PDRB Kota Semarang sebesar 67,04% pada tahun 2000 dan menurun menjadi 64,53% pada tahun 2004.

Sementara Kendal yang difokuskan oleh pemerintah daerah sebagai daerah utama kawasan ekonomi khusus cenderung menunjukkan tingkat spesialisasinya yang rendah yaitu sebesar 0,58, meskipun cenderung terjadi peningkatan nilai IS. Di kabupaten ini, sektor tradisional masih cukup memiliki peran penting. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sepanjang tahun 2000 – 2004 sebesar 24,04% dan industri pengolahan menyumbang PDRB sebesar 40,38%.

Demikian pula untuk daerah KEKI 2, sektor-sektor ekonomi di kabupaten Blora dan Rembang cenderung tidak terspesialisasi. Kedua daerah ini menunjukkan rata-rata indeks spesialisasi sebesar 0,58 dan 0,62. Terlebih lagi, kedua daerah ini masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor utama dimana sektor ini memberikan kontribusi bagi PDRB masih lebih dari 50%. Sementara, industri pengolahan di Blora menyumbang PDRB sebesar 12,58% dan di Rembang sebesar 4,74%. Jika daerah ini ditetapkan sebagai kawasan andalan dengan tujuan pengembangan ekonomi berbasis sektor industri maka kedua daerah ini cenderung kurang layak. Dengan demikian, dari pembahasan mengenai indeks spesialisasi dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tidak melihat aspek spesialisasi daerah sebagai pertimbangan utama dalam menentukan apakah suatu kawasan tepat ditentukan sebagai kawasan andalan.

KESIMPULAN

1. KEK yang diusulkan oleh pemerintah Propinsi Jawa Tengah meliputi dua KEK: KEK Semarang – Kendal – Demak – Ungaran (Kabupaten Semarang) dan KEK Rembang – Blora. Titik berat dari KEK Jawa Tengah adalah penentuan wilayah Kendal sebagai basis dari KEK.
2. Penentuan kawasan KEKI cenderung bukan didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya karena keduanya tidak menjadi faktor pertimbangan penghambat bagi pemerintah daerah. Hal ini terbukti dari kondisi Kabupaten Demak, Rembang, dan Blora yang dikategorikan daerah relatif tertinggal.
3. Kabupaten Kendal direncanakan sebagai basis KEK Jawa Tengah karena memang memiliki keunggulan dan potensi unggulan di sektor industri pengolahan. Meskipun demikian, kabupaten ini dikategorikan sebagai daerah maju yang tertekan dan daerah dengan indeks spesialisasi yang rendah. Jika dilihat dari posisi relatifnya yang dekat dengan pelabuhan laut dan sarana prasarana Kota Semarang, maka Kendal dapat menjadi alternatif prioritas sebagai kawasan andalan industri dengan syarat penyediaan lahan untuk pengembangan industri.
4. Alternatif penentuan Kawasan Joglosemar sebagai kawasan andalan perlu dicermati. Ketiga daerah ini merupakan daerah ekonomi utama di Jawa bagian Tengah. Dengan didukung tipologi sebagai daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh, ketiga daerah ini memiliki fasilitas pelabuhan udara dan prasarana ekonomi penting lainnya, terutama Semarang dengan fasilitas pelabuhan lautnya. Pengembangan kawasan khusus Joglosemar akan memberikan manfaat aglomerasi sepanjang koridornya.

Penelitian ini masih menyisakan beberapa permasalahan yang perlu untuk lebih banyak dikaji, yaitu:

1. Penelitian ini menyarankan adanya studi yang lebih khusus mengenai efek aglomerasi di kawasan ekonomi khusus. Penelitian tersebut akan penting untuk melihat apakah aglomerasi di kawasan khusus ini mampu memberikan manfaat positif bagi daerah yang relatif jauh dari pusat pertumbuhan Jawa Tengah-DIY.
2. Perlu dilihat secara spesifik bagaimana model dan kriteria investasi yang tepat untuk kawasan khusus tersebut. Hal ini penting untuk mempercepat pertumbuhan investasi kawasan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan permintaan input lokal dan tambahan lapangan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2006, *Berita Penataan Ruang*, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, Edisi 02 – Mei 2006, Jakarta.
- _____, *Sambutan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas pada Rapat Pleno Dengan Gubernur, Musrenbangnas, 17 April 2006*, Jakarta.
- Dahl, Michel S., 2001. *Overview of The Histories of Geographical Clustering and Agglomeration*, prepared for the DRUID Winter Seminar in Korsor, Denmark.
- Glaeser, E.L, Kallal, H.D, Scheinkman, J.A., Shleifer, A .,1992, Growth in Cities, *The Journal of Political Economy* 100.
- Hanson, G.H, 1996, Agglomeration, Disersion, and The Pioneer Firm, *The Journal of Political Economy*, 39.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro, M., Widodo, T., Sulistyningrum, E., 2005, *Pembangunan Daerah kabupaten Sleman di Era Otonomi: Analisis Kebijakan dan Implikasinya Bagi Perencanaan jangka Panjang*, Kerja sama Pusat Studi Ekonomi & Kebijakan Publik UGM dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomio dan Masyarakat FE UI, Maret 2005.
- Ottaviano, Gianmarco IP. And Puga, Diego, 1997, *Agglomeration in The Gloal Economy – A Survey of The 'New Economic Geography'*, Centre of Economic Performance, Discussion paper No 356, August 1997.
- Renyansih, 2002, Pendekatan dan Program Pengembangan Kawasan, *Bulletin Kawasan*, Edisi 2 – 2002, Publikasi Direktorat Pengembangan kawasan Khusus dan Tertinggal, Jakarta.
- Rygbi, D and Essletzbichler, J, 2002, Agglomeration Economic and Productivity Difference in US Cities, *Journal of Economic Geography*, 2.
- Wagner, 2000, Regional Economic Diversity: Action, Concept, or State of Confusion, *The Journal of Regional Analysis and Policy* (2000)30:2.
- Yuwono, P, 2000, *Perencanaan dan Analisis Kebijakan Pembangunan*, Edisi 1. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

LAMPIRAN

Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota di Jateng DIY, 2000 - 2004

No	Kab/Kota	Singkatan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Berkapita (rata-rata tahunan)
1	Cilacap	Clc	5,51%	Rp6.338.886,94
2	Banyumas	Bms	3,70%	Rp1.864.566,26
3	Purbalingga	Pbg	3,48%	Rp1.820.520,86
4	Banjarnegara	Bjn	1,72%	Rp2.400.768,63
5	Kebumen	Kbm	2,80%	Rp1.724.930,54
6	Purworejo	Prj	3,64%	Rp2.657.538,66
7	Wonosobo	Wns	2,33%	Rp1.879.439,20
8	Magelang	Mgl	3,89%	Rp2.569.232,47
9	Boyolali	Byl	3,50%	Rp3.301.313,08
10	Klaten	Klt	4,29%	Rp2.695.421,15
11	Sukoharjo	Skh	3,82%	Rp3.808.952,89
12	Wonogiri	Wng	2,67%	Rp2.048.961,16
13	Karanganyar	Kra	4,11%	Rp4.205.737,29
14	Sragen	Sra	3,40%	Rp2.415.290,66
15	Grobogan	Grb	4,09%	Rp1.516.826,67
16	Bloora	Blr	3,38%	Rp2.080.844,66
17	Rembang	Rmb	4,24%	Rp2.574.707,26
18	Pati	Pat	2,71%	Rp2.644.342,12
19	Kudus	Kds	2,65%	Rp11.173.157,72
20	Jepara	Jpr	3,87%	Rp2.966.284,13
21	Demak	Dmk	3,12%	Rp2.397.660,75
22	Semarang	Smg	3,23%	Rp4.255.158,96
23	Temanggung	Tmg	3,77%	Rp2.864.189,98
24	Kendal	Knd	2,96%	Rp4.371.481,74
25	Batang	Btg	2,06%	Rp2.707.416,73
26	Pekalongan	Pkl	2,93%	Rp2.874.242,13
27	Pemalang	Pml	3,52%	Rp2.031.906,88
28	Tegal	Tgl	4,94%	Rp1.725.315,50
29	Brebes	Brb	5,12%	Rp2.198.020,35
30	Kota Magelang	KMgl	3,43%	Rp6.802.671,17
31	Kota Surakarta	KSrk	5,04%	Rp6.747.625,28
32	Kota Salatiga	KSlt	4,19%	Rp4.685.739,14
33	Kota Semarang	KSmg	4,44%	Rp11.390.236,85
34	Kota Pekalongan	KPKl	3,84%	Rp5.446.102,47
35	Kota Tegal	KTgl	5,90%	Rp3.263.850,54
36	Kulonprogo	Klp	3,82%	Rp3.480.781,20
37	Bantul	Bnt	4,25%	Rp3.520.469,46
38	Gunung Kidul	Gnk	3,22%	Rp3.630.345,46
39	Sleman	Slm	4,76%	Rp4.725.662,38
40	Kota Yogyakarta	Kygy	4,43%	Rp9.726.629,72
Rata-rata Jateng-DIY			3,7198%	Rp3.788.330,73

Sumber: BPS, data diolah

Tabel 6. Rata-rata SLQ Jateng-DIY, 2000-2004

Kawasan	Kabupaten	Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEKI 1	Demak	2,063	0,219	0,693	0,558	0,464	0,730	0,461	0,542	0,751
	Semarang	0,676	0,137	1,981	1,001	0,242	0,782	0,414	0,702	0,832
	Kendal	1,005	0,446	1,666	1,960	0,314	0,753	0,451	0,490	0,821
	Kota Semarang	0,047	0,352	1,353	1,342	1,954	1,357	1,214	0,873	1,078
KEKI 2	Bloora	2,099	2,938	0,519	0,546	0,642	0,585	0,526	1,392	0,650
	Rembang	2,239	2,440	0,196	0,506	0,643	0,759	1,143	0,628	0,780
Non KEKI	Cilacap	1,001	1,718	0,516	0,594	0,378	2,028	0,512	0,598	0,441
	Banyumas	1,161	1,608	0,829	1,058	0,783	0,663	1,467	1,793	1,239
	Purbalingga	1,518	0,485	0,441	0,994	1,097	0,788	0,904	0,804	1,711
	Banjarnegara	1,628	0,541	0,609	0,446	1,191	0,540	0,939	1,069	1,505
	Kebumen	1,749	6,113	0,439	0,791	0,891	0,435	0,809	1,098	1,519
	Purworejo	1,587	2,434	0,370	0,607	1,066	0,702	1,012	0,942	1,665
	Wonosobo	2,133	0,752	0,485	0,879	0,856	0,495	1,185	1,094	0,748
	Magelang	1,414	2,422	0,790	0,548	0,990	0,669	1,067	0,568	1,369
	Boyolali	1,479	0,762	0,758	0,815	0,495	1,099	0,536	1,316	0,599
	Klaten	1,043	0,457	0,806	0,699	1,513	1,114	0,552	0,861	1,196
	Sukoharjo	0,983	1,150	1,305	1,194	0,918	0,869	0,957	0,756	0,789
	Wonogiri	2,301	0,838	0,156	0,667	0,652	0,541	1,817	0,791	0,948
	Karanganyar	0,654	0,963	2,217	1,272	0,523	0,482	0,601	0,465	0,828
	Sragen	1,556	1,308	0,782	1,223	0,520	0,722	0,854	0,742	1,226
	Grobogan	1,949	1,251	0,162	0,806	0,970	0,818	0,704	0,877	1,384
	Pati	1,585	0,862	0,810	1,149	0,644	0,833	0,539	1,122	0,823
	Kudus	0,185	0,010	2,391	0,407	0,184	1,208	0,387	0,553	0,220
	Jepara	1,035	0,509	1,181	0,691	0,746	0,908	1,127	1,088	0,810
	Temanggung	1,536	1,228	0,724	0,834	1,231	0,638	1,046	0,768	1,218
	Batang	1,185	2,359	1,215	0,729	0,898	0,710	0,527	0,573	1,117
	Pekalongan	0,893	1,118	1,170	0,845	1,043	0,808	0,813	0,977	1,365
	Pemalang	1,353	1,072	0,746	0,891	0,551	1,187	0,698	0,809	0,799
	Tegal	0,951	2,089	1,065	0,702	0,895	1,074	0,925	1,310	0,667
	Brebes	2,399	1,135	0,401	0,934	0,372	0,852	0,248	0,670	0,364
Kota Magelang	0,143	0,000	0,151	2,944	3,362	0,278	3,709	2,161	3,477	
Kota Surakarta	0,004	0,052	1,222	2,541	2,440	1,019	1,987	1,983	1,075	
Kota Salatiga	0,268	0,657	0,814	4,947	0,976	0,723	4,405	1,394	1,615	
Bantul	0,672	0,000	0,873	1,066	1,692	1,103	1,461	1,649	1,045	
Gunung Kidul	0,703	0,000	0,607	2,698	1,558	0,937	2,866	2,015	1,052	
Sleman	1,188	1,130	0,676	0,645	0,911	0,687	1,848	1,055	1,639	
Kota Yogyakarta	1,075	1,204	0,845	0,870	1,693	0,759	1,314	1,136	1,193	

Sumber: BPS, data diolah, di mana sektor 1-9 merupakan sektor-sektor komponen PDRB

Tabel 7. Rata-rata DLQ Jateng-DIY, 2000-2004

Kawasan	Kabupaten	Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEKI 1	Demak	1,038	0,992	0,993	1,043	0,992	0,973	0,983	0,972	0,976
	Semarang	0,984	0,985	1,010	1,014	1,017	0,984	1,037	1,015	1,006
	Kendal	0,991	1,004	1,014	0,870	0,966	1,006	0,963	0,993	1,018
	Kota Semarang	0,987	1,013	1,002	0,997	0,971	0,969	1,009	0,984	1,047
KEKI 2	Blora	1,026	0,964	1,016	1,039	0,963	0,997	0,964	1,000	0,957
	Rembang	1,033	0,976	0,954	0,954	0,967	0,985	1,013	0,974	0,974
Non KEKI	Cilacap	0,990	1,034	0,964	0,970	0,998	1,027	0,942	0,953	0,960
	Banyumas	0,981	1,019	1,027	1,002	1,000	1,003	0,979	1,012	0,997
	Purbalingga	1,014	0,994	1,013	1,018	0,999	1,005	0,959	1,020	0,976
	Banjarnegara	0,978	0,999	1,028	1,052	0,983	0,986	1,042	1,045	1,040
	Kebumen	1,005	1,028	1,001	1,018	0,993	1,040	0,999	0,992	0,977
	Purworejo	0,999	1,003	1,014	0,956	1,036	0,978	1,052	1,041	0,993
	Wonosobo	1,013	1,009	1,009	0,951	0,991	1,006	1,019	0,989	0,995
	Magelang	0,977	0,997	1,008	1,029	1,030	0,997	0,983	0,959	1,067
	Boyolali	1,023	0,998	0,957	1,199	0,996	0,997	0,990	1,000	1,072
	Klaten	0,980	1,037	1,010	1,030	1,047	0,987	0,988	0,975	1,037
	Sukoharjo	1,001	0,958	1,001	1,002	1,004	0,988	0,994	1,013	1,037
	Wonogiri	0,999	1,013	1,063	1,007	0,995	0,991	1,015	1,030	1,048
	Karanganyar	1,014	1,005	1,005	1,012	1,011	0,974	1,052	0,966	0,978
	Sragen	0,969	0,970	1,031	1,011	1,046	1,005	1,010	0,984	1,068
	Grobogan	1,024	0,996	0,999	0,968	0,986	0,999	0,992	1,002	0,971
	Pati	0,992	0,962	1,036	1,043	1,033	0,997	0,953	1,005	1,021
	Kudus	1,032	0,949	1,000	1,026	1,080	0,987	1,043	1,032	0,987
	Jepara	1,022	1,017	0,988	1,044	1,123	0,980	0,963	1,042	0,989
	Temanggung	1,021	0,986	1,007	0,996	1,002	1,002	0,996	0,980	0,961
	Batang	0,983	0,966	1,011	1,053	1,060	0,991	1,007	1,012	1,023
	Pekalongan	1,009	0,953	1,003	0,995	0,963	0,995	1,005	1,015	0,992
	Pemalang	0,989	1,029	0,987	1,063	0,959	1,024	1,009	1,023	1,016
	Tegal	0,945	1,113	1,042	0,965	1,009	1,001	0,990	1,083	0,939
	Brebes	1,027	0,996	1,006	0,965	0,999	0,990	0,989	0,963	0,988
	Kota Magelang	0,894	0,000	0,979	0,984	0,990	1,009	0,996	0,981	0,975
	Kota Surakarta	0,847	0,958	1,004	0,976	0,967	1,000	0,961	0,979	0,994
Kota Salatiga	0,998	0,983	0,984	0,972	0,987	0,982	1,030	0,965	0,958	
Bantul	1,024	#DIV/0!	1,006	0,960	0,969	1,002	0,952	0,992	0,978	
Gunung Kidul	1,016	#DIV/0!	0,995	0,984	0,963	1,040	0,974	0,972	0,938	
Sleman	1,003	0,881	0,998	1,022	0,986	0,983	1,025	1,070	0,984	
Kota Yogyakarta	1,001	0,964	0,994	1,057	0,984	1,012	0,977	1,037	0,989	

Sumber: BPS, data diolah, di mana sektor 1-9 merupakan sektor-sektor komponen PDRB

Tabel 8. Indeks Spesialisasi Regional Jateng-DIY, 2000-2004

Kawasan	Kabupaten/ Kota	Tahun					Rata-rata	Perkem-bangan
		2000	2001	2002	2003	2004		
KEKI 1	Demak	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,53	meningkat
	Semarang	0,66	0,69	0,69	0,68	0,67	0,68	meningkat
	Kendal	0,57	0,58	0,58	0,59	0,59	0,58	meningkat
	Kota Semarang	0,77	0,76	0,75	0,73	0,73	0,75	menurun
KEKI 2	Blora	0,56	0,57	0,58	0,59	0,59	0,58	meningkat
	Rembang	0,60	0,62	0,63	0,63	0,64	0,62	meningkat
Non KEKI	Cilacap	0,70	0,70	0,73	0,75	0,76	0,73	meningkat
	Banyumas	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	meningkat
	Purbalingga	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	menurun
	Banjarnegara	0,48	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	menurun
	Kebumen	0,57	0,57	0,58	0,58	0,57	0,57	meningkat
	Purworejo	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	meningkat
	Wonosobo	0,57	0,56	0,56	0,57	0,58	0,57	menurun
	Magelang	0,43	0,43	0,43	0,44	0,45	0,44	meningkat
	Boyolali	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	menurun
	Klaten	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	meningkat
	Sukoharjo	0,48	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	menurun
	Wonogiri	0,68	0,68	0,68	0,67	0,66	0,67	menurun
	Karanganyar	0,78	0,74	0,75	0,76	0,78	0,76	menurun
	Sragen	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	menurun
	Grobogan	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,56	meningkat
	Pati	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	meningkat
	Kudus	0,99	0,98	0,98	0,98	0,97	0,98	menurun
	Jepara	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	menurun
	Temanggung	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	meningkat
	Batang	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	meningkat
	Pekalongan	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,47	menurun
	Pemalang	0,46	0,46	0,47	0,47	0,48	0,47	meningkat
	Tegal	0,47	0,48	0,49	0,50	0,52	0,49	meningkat
	Brebes	0,65	0,66	0,68	0,69	0,69	0,67	meningkat
	Kota Magelang	1,18	1,16	1,17	1,17	1,17	1,17	menurun
	Kota Surakarta	0,77	0,76	0,75	0,74	0,74	0,75	menurun
Kota Salatiga	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	meningkat	
Kota Pekalongan	0,54	0,52	0,53	0,53	0,52	0,53	menurun	
Kota Tegal	0,59	0,56	0,57	0,59	0,58	0,58	meningkat	
Kulonprogo	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	meningkat	
Bantul	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	menurun	
Gunung Kidul	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,50	meningkat	
Sleman	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	menurun	
Kota Yogyakarta	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	menurun	

Sumber: BPS, data diolah